



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Pasca PSU, MK Akan Putus Kembali Sengketa Hasil Pilkada Boven Digoel

Jakarta, 30 Agustus 2021 – Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang Pengucapan Putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Boven Digoel pada Selasa (31/08) pukul 10.00 WIB. Persidangan yang teregistrasi dengan Nomor 147/PHP.BUP-XIX/2021 diajukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 Martinus Wagi – Isak Bangri.

Pasca pemungutan dan penghitungan suara ulang yang dilakukan Termohon, Pemohon keberatan dengan hasil perhitungan suara tersebut karena terdapat kecurangan dan pelanggaran. Berdasarkan hal tersebut Pemohon meminta MK membatalkan keputusan Termohon. Kuasa hukum Pemohon Baharudin Farawoman menilai perolehan suara yang memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Hengky Yaluwo dan Lexi Romel Wagi tidak sah. Hal tersebut disebabkan karena Termohon tidak mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel khususnya Distrik Jair sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menanggapi permohonan tersebut, Rabu (18/8) lalu, KPU Boven Digoel membantah seluruh dalil Pemohon

Pada sidang putusan sebelumnya, MK Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Yusak Yaluwo dan Yakob Weremba. Selain itu, MK juga memerintahkan kepada KPU Provinsi Papua selaku KPU Kabupaten Boven Digoel untuk melakukan pemungutan suara ulang Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel tanpa mengikutsertakan Pasangan Calon Yusak Yaluwo dan Yakob Weremba. (tir)

Tentang Mahkamah Konstitusi Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman

www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
Telepon: 08121017130